



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD AMIR ALI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK**
3. NHK : **518866**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 12.833.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 620 m2/300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1350 m2/72 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA SUKAMARA, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 103.500.000
6. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 4.650.000.000
8. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 77.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU JIP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SKUTIK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



3. MOTOR, YAMAHA SKUTIK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
4. MOTOR, HONDA SKUTIK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 124.379.208

F. HARTA LAINNYA Rp. 400.000.000

Sub Total Rp. 13.510.379.208

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 13.510.379.208

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.